

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN DALAM
KEMASAN KATEGORI “MD” OLEH BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI SEMARANG SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN DI KOTA
SEMARANG**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Yustina Indah Suryani
NIM 16.C2.0043

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

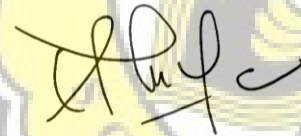
TESIS

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN DALAM
KEMASAN KATEGORI “MD” OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
dan MAKANAN JAWA TENGAH SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK
KONSUMEN ATAS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG**

diajukan oleh
Yustina Indah Suryani
NIM 16.C2.0043

telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Ir. Ch. Retnaningsih, MP

tanggal

20 Desember 2019

Pembimbing II



Ign. Hafyo Purwanto, SH.,MH

tanggal

20 Desember 2019



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dukur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis disusun oleh :

Nama : YUSTINA INDAH SURYANI

Nim : 16.C2.0043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 27 Januari 2020

Susunan Dewan Penguji

Dosen-Penguji ;

1. Dr. Ir. Ch. Retnaningsih, MP

2. Ignatius Hartono Purwanto, SH., MH

3. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 27 Januari 2020

Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
Ketua Program Studi
Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang. Pengawasan Produk Pangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun peraturan ini masih bersifat umum, namun peraturan pelaksanaan tentang pengawasan produk pangan yang ada sudah tidak relevan dengan UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012. Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” bertujuan agar masyarakat selaku konsumen terpenuhi atas salah satu kebutuhan dasarnya adalah pangan yang sesuai standar yaitu aman, bermanfaat/berkhasiat, bergizi sebagai pemenuhan hak konsumen atas kesehatan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan perkuliahan Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis mendapat bimbingan dan arahan yang berharga dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan yang sangat berarti kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, S.E.,S.Kom.,M.S.,I.E.,C., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Program Magister Hukum Kesehatan.

2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Ir. Ch. Retnaningsih, MP., selaku dosen pembimbing utama atas bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
5. Ignatius Hartyo Purwanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua atas bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ketulusan hati memberikan pengajaran dan pemahaman khususnya tentang hukum kesehatan.
7. Para staf sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang dengan kebaikan hati memberikan bantuan terkait administrasi selama kegiatan perkuliahan sampai selesainya proses tesis ini.
8. Bapak Ibu tercinta, suami tercinta Hendrikus Supriyono, kedua buah hatiku tercinta Albertus Kevin Priambodo dan Thomas Aquinas Dewa

Patriciano yang saya kasihi, atas kasih, dukungan doa dan semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang secara khusus kepada Kepala Bidang Penindakan, Kepala Seksi Sertifikasi, Kepala Seksi Inspeksi dan Tata Usaha atas dukungan dan bantuannya dalam memberikan informasi dan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
10. Pimpinan supermarket, pedagang sembako di Pasar Tradisional dan konsumen supermarket atas kesediaannya dan bantuannya dalam memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
11. Rekan-rekan di Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan XXVI yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan dan kekurangannya, penulis bersikap terbuka terhadap saran dan kritik membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, menambah informasi, bahan pembandingan bagi penelitian dengan materi yang sejenis serta menambah literatur di bidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan produk pangan.

Semarang, 25 Januari 2020

Penulis

Yustina Indah Suryani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN dan DEFINISI	xiii
HALAMAN PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
F. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Konsep	12
2. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Definisi Operasional	17
4. Jenis Data	17
a. Data Primer	17
b. Data Sekunder	18
5. Metode Pengumpulan Data	20
a. Studi Lapangan	20
b. Studi Kepustakaan	20
6. Metode <i>Sampling</i> dan Lokasi Penelitian	20
7. Metode Analisa Data	21
8. Metode Penyajian Data	21
H. Rencana Penyajian Tesis	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pangan	24
1. Pengertian tentang Pangan	24
2. Keamanan Pangan	26
a. Pengertian Keamanan Pangan	26
b. Pengertian Ketersediaan Pangan	26
c. Sistem Keamanan Pangan	27
d. Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	27

B. Pengawasan	29
1. Pengertian Pengawasan	29
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	30
a. Maksud Pengawasan	30
b. Tujuan Pengawasan	30
3. Macam-macam Pengawasan	31
a. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung	31
b. Pengawasan Preventif, Represif dan Pengawasan Umum	32
c. Pengawasan Ditinjau Dari Segi Kedudukan Badan/Organ yang Melaksanakan Pengawasan	32
d. Pengawasan Dari Segi Hukum	33
e. Pengawasan Menurut Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1989	33
4. Fungsi Pengawasan	34
5. Pengawasan di Bidang Kesehatan	34
6. Pengawasan Terkait Perlindungan Konsumen	36
C. Badan Pengawas Obat dan Makanan	37
1. Pengertian BPOM	37
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPOM	37
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM	39
4. Pengawasan BPOM	40
a. Pengawasan <i>Pre-market</i>	41
b. Pengawasan <i>Post-market</i>	42
D. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	43
1. Unit Pelaksana Teknis BPOM	43
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT. BPOM	43
3. Klasifikasi UPT. BPOM	44
4. Struktur Organisasi BBPOM	45
E. Konsumen	45
1. Pengertian Konsumen	45
2. Jenis Konsumen	46
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	47
F. Sarana Perdagangan Produk Pangan	48
1. Toko Modern	48
2. Pasar Tradisional	49
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum BBPOM di Semarang	50
a. Data Umum Wilayah Kerja	50
b. Sumber Daya Manusia	51
c. Anggaran	51
2. Gambaran Umum Toko Modern	52
a. ADA Supermarket	53
b. Gelael Supermarket	53
c. Giant Ekstra Supermarket	54
3. Gambaran Umum Pasar Tradisional	54
a. Pasar Waru Indah	55

b. Pasar Sampangan Baru	56
c. Pasar Peterongan	56
4. Hasil Wawancara dengan BBPOM dan Responden	57
a. Hasil Wawancara dengan BBPOM di Semarang	57
b. Hasil Wawancara dengan Responden	79
1) Pimpinan Supermarket	79
2) Pedagang Sembako di Pasar Tradisional	82
3) Konsumen di Supermarket	86
5. Tujuan Pengawasan Produk Pangan Terhadap Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan	88
B. Pembahasan	91
1. Pengaturan tentang Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan di Kota Semarang	91
a. Dasar Hukum Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang	91
b. Peraturan Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD”	100
2. Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang	108
a. BBPOM di Semarang Sebagai Lembaga Terkait Pengawasan	109
b. Jenis, Bentuk dan Obyek Pengawasan	110
c. Mekanisme Pengawasan	112
d. Ruang Lingkup Pengawasan	118
e. Tindak Lanjut Pengawasan	119
3. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang	120
a. Faktor Teknis	120
b. Faktor Sosial	122
c. Faktor Yuridis	124
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	132

DAFTAR TABEL

1. Distribusi Insiden Keracunan Berdasarkan Kelompok Penyebab	3
2. Peraturan Dalam Pengawasan <i>Post-Market</i> Oleh BPOM	42
3. Wilayah Kerja BBPOM di Semarang	51
4. Sumber Dana Atau Anggaran BBPOM di Semarang	52
5. Peraturan Terkait Pengawasan Produk Pangan	62
6. Data Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Produk Pangan Kategori “MD” yang Diperiksa	66
7. Intensitas Pengawasan Penjual Parsel di Kota Semarang	71
8. Hasil Pemeriksaan Uji Sampel Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” di Kota Semarang	72
9. Hasil Pengawasan Iklan Sediaan Makanan / Minuman	74
10. Persyaratan dan Fasilitas terkait SDM di Supermarket menurut Perka BPOM Tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik	80
11. Volume Belanja Konsumen Dalam Satu Bulan Produk Pangan Dalam Kemasan Kategori “MD” yang Dikonsumsi	86
12. Data Konsumen yang Memperhatikan Label	87
13. Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Produksi Produk Pangan Tahun 2016 – 2018	118
14. Pengawasan BBPOM di Semarang Pada Sarana Distribusi Produk Pangan Tahun 2016 – 2018	119

DAFTAR GAMBAR

1. Tiga Pilar Dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	40
2. Struktur Organisasi BBPOM	45
3. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis BBPOM	61



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan di Kota Semarang	134
2. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Pangan di Kota Semarang	135
3. Hasil Pengawasan BBPOM di Semarang tentang Penandaan Label Produk Pangan di Fasilitas Distribusi	136



DAFTAR SINGKATAN DAN DEFINISI

A. SINGKATAN

1. ABK : Analisis Beban Kerja
2. AKG : Angka Kecukupan Gizi
3. AMDK : Air Minum Dalam Kemasan
4. APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
5. Balai POM : Balai Pengawas Obat dan Makanan
6. BBPOM : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
7. BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. BTP : Bahan Tambahan Pangan
9. CAPA : *Corrective Action and Preventive Action*
10. CPPOB : Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
11. CRPB : Cara Ritel Pangan yang Baik
12. DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
13. FEFO : *First Expired First Out*
14. FIFO : *First In First Out*
15. GKPD : Gerakan Keamanan Pangan Desa
16. GMP : *Good Manufacturing Practices*
17. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi
18. Loka POM : Loka Pengawas Obat dan Makanan
19. NIE : Nomor Izin Edar
20. Panggul Sekzi : Pangan Unggulan Daerah Sehat Keamanannya Terjaga dan Bergizi
21. Perka BPOM Sertifikasi CPPOB 2014 :
Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
22. Permenperind CPPOB 2010 :
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
23. PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 2004 :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
24. P-IRT : Pangan Industri Rumah Tangga
25. PJAS : Pangan Jajan Anak Sekolah
26. PMR : Penanganan Management Resiko
27. PNBP : Pendapatan Negara Bukan Pajak
28. PSB : Pemeriksaan Sarana oleh Balai
29. Renstra : Rencana Strategis
30. SDM : Sumber Daya Manusia
31. SIPT : Sistem Informasi Pelaporan Terpadu
32. SIKerNas : Sentra Informasi Keracunan Nasional
33. SisPOM : Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
34. SKE : Surat Keterangan Eksport

- 35. SKI : Surat Keterangan Import
- 36. SOP : *Standar Operating Prosedur*
- 37. TIE : Tanpa Izin Edar
- 38. TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
- 39. TMS : Tidak Memenuhi Syarat
- 40. ULPK : Unit Layanan Pengaduan Konsumen
- 41. UPT. BPOM : Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 42. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 43. UU HAM 1999 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 44. UU Kesehatan 2009 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 45. UU Pangan 2012 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 46. UUPK 1999 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

B. DEFINISI

- 1. MD : Kode Nomor Izin Edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri
- 2. ML : Kode Nomor Izin Edar untuk pangan olahan produksi luar negeri
- 3. Pagu Anggaran : Plafon atau batas tertinggi atas anggaran yang ditetapkan



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

**“ PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN DALAM
KEMASAN KATEGORI “MD” OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN (BBPOM) DI SEMARANG SEBAGAI UPAYA
PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN DI KOTA
SEMARANG ”**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,



(Yustina Indah Suryani)

NIM. 16.C2.0043

ABSTRAK

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” yang memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” di kota Semarang dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang. Fakta masih ditemukan produk pangan, sarana produksi dan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen atas kesehatan. Maka peneliti melakukan penelitian pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitik menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedang metode analisa data menggunakan analisis kualitatif.

Pengaturan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan sudah ada, namun masih ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Pelaksanaan pengawasan produk pangan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis, faktor sosial dan faktor yuridis. Faktor teknis terkait jumlah Anggaran dan SDM yang terbatas dengan latar pendidikan beragam serta kompetensi belum merata untuk audit semua komoditi. Faktor sosial disebabkan kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, perilaku pelaku usaha yang menggunakan pihak ketiga untuk mengurus perijinan dan konsisten mematuhi peraturan, pimpinan supermarket dan pedagang sembako di pasar tradisional untuk meningkatkan pengetahuan dan konsistensi untuk mematuhi peraturan terkait pangan, konsumen untuk bersikap peduli dan memahami hak sebagai konsumen terhadap produk pangan yang dikonsumsi. Faktor yuridis dimana penetapan UU Kesehatan 2009 dan UU Pangan 2012 tidak ditindaklanjuti dengan perubahan PP No. 28 Tahun 2012 lebih meningkatkan kinerja BBPOM di Semarang lebih *efektif* dan *efisien*.

Kata Kunci : Pengawasan BBPOM, Produk Pangan “MD”, Hak Konsumen

ABSTRACT

Food is one of the basic human needs. Every consumer has the right to get food products in the "MD" category that meets food safety standards. Supervision of food products in the "MD" category in Semarang is carried out by BBPOM in Semarang. The current reality of the standard shows that the food products, production facilities and distribution facilities do not meet the provisions. This results are in the non-fulfillment of consumers' right for health. So the researchers conducted a research on the implementation of food product supervision in the "MD" category by BBPOM in Semarang as an effort to fulfill the consumer's right for health in the city of Semarang.

This research is a sociological juridical study, descriptive analytic research specifications using primary data and secondary data. The method of collecting data through field studies and literature studies while the method of data analysis uses qualitative analysis. The regulation of supervision of food products in the "MD" category by BBPOM in Semarang as an effort to fulfill the consumer's right for health already exists, but food products that do not meet the food safety requirements are still found. The implementation of food product supervision in the packaging category "MD" by BBPOM in Semarang has not run optimally. This is caused by several factors including technical factors, social factors and juridical factors. Technical factors related to the limited number of budgets and human resources with diverse educational backgrounds and competencies have not been evenly distributed for audits of all commodities.

Social factors are caused by the lack of optimal cross-sectoral coordination, the behavior of business operators who use third parties to take care of licensing and consistently comply with regulations, supermarkets and groceries traders in traditional markets to increase knowledge and consistency to comply with regulations related to food, consumers to be concerned and understand their rights as consumers of food products consumed. Juridical factor where the stipulation of the 2009 Health Law and the 2012 Food Law were not followed up with changes to PP No. 28 of 2012 further enhance the performance of BBPOM in Semarang more effectively and efficiently.

Keywords: *BBPOM Supervision, "MD" Food Products, Consumer Rights*